

Disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten dan kota

Sudirman¹, Nur Rizky Putri Mahadi²

^{1,2}UIN Alauddin Makassar

¹Email: yudih65@yahoo.co.id

²Email: nurriszky.p.mahadi28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan disparitas ekonomi antar wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi Klassen, analisis williamson, dan model rasio pertumbuhan. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa Kabupaten Boalemo masuk kategori daerah maju tapi tertekan dengan nilai $Y_{di} = 24.676.175,20$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 6,82$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} < R_{ni}$); Kabupaten Gorontalo masuk dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh dengan nilai $Y_{di} = 24.172.347,86$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 7,04$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$); Kabupaten Pohuwato, kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat dengan nilai $Y_{di} = 31.064.122,67$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 6,89$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$); Kabupaten Bone Bolango, kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat dengan nilai $Y_{di} = 20.459.565,73$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 7,11$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$); Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan nilai $Y_{di} = 20.548.823,15$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$); Kota Gorontalo, memiliki nilai $Y_{di} = 28.796.832,15$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan $R_{di} = 7,58$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$), artinya termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat. Kemudian, berdasarkan analisis indeks williamson, ditemukan bahwa di Provinsi Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang relatif rendah yaitu sebesar 0,12.

Kata Kunci: Disparitas; ekonomi; antar wilayah; kabupaten dan kota

Disparities in economic growth between regencies and cities

Abstract

This study aims to analyze the growth and economic disparities between districts and cities in Gorontalo Province. The analytical tools used were Klassen's typology, Williamson's analysis, and growth ratio models. In this study, it was found that Boalemo Regency was categorized as a developed but depressed area with values at $Y_{di} = 24,676,175.20$ and $Y_{ni} = 19,528,078.58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), while the values of $R_{di} = 6.82$ and $R_{ni} = 6.88$ ($R_{di} < R_{ni}$); Gorontalo Regency is included in the category of fast-growing and fast-growing regions with the values of $Y_{di} = 24,172,347.86$ and $Y_{ni} = 19,528,078.58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), while the values of $R_{di} = 7.04$ and $R_{ni} = 6.88$ ($R_{di} > R_{ni}$); Pohuwato Regency, the category of regions with fast progress and fast growth with values of $Y_{di} = 31,064,122.67$ and $Y_{ni} = 19,528,078.58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), while the values of $R_{di} = 6.89$ and $R_{ni} = 6.88$ ($R_{di} > R_{ni}$); Bone Bolango Regency, the category of regions with fast progress and fast growth with the value of $Y_{di} = 20,459,565.73$ and $Y_{ni} = 19,528,078.58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), while the values of $R_{di} = 7,11$ and $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$); North Gorontalo District shows the value of $Y_{di} = 20,548,823.15$ and $Y_{ni} = 19,528,078.58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$); Gorontalo City, has a value of $Y_{di} = 28,796,832.15$ and $Y_{ni} = 19,528,078.58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), while $R_{di} = 7.58$ and $R_{ni} = 6.88$ ($R_{di} > R_{ni}$), meaning that they are included in the fast area category progress and grow fast. Then, based on Williamson index analysis, it was found that Gorontalo Province has a relatively low level of economic inequality, namely 0.12.

Keywords: Disparity; economy; between regions; district and city

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai oleh setiap pemerintahan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah pemerintahan. Dalam pengertian ini, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita oleh masyarakat pada suatu wilayah, karena itu, kajian ini harus dianalisis dengan menggunakan teori pertumbuhan GDP dan teori pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara jumlah total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertahun pada wilayah bersangkutan. Sementara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi regional, dapat dilakukan dengan menggunakan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada setiap periodenya dan data pertumbuhan jumlah penduduk pada wilayah bersangkutan. Apabila PDRB oleh suatu wilayah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dari periode ke periode. Dengan demikian, situasi tersebut dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut mengalami pertumbuhan. Pendapatan perkapita adalah merupakan hasil bagi antara jumlah total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pada wilayah tertentu (Bambang Prishardoyo, 2008).

Tujuan pemerintah, tidak sekedar mengejar pertumbuhan yang tinggi akan tetapi, juga pemerataan pendapatan oleh masyarakat, karena pertumbuhan yang tinggi, tanpa diikuti dengan pemerataan, maka manfaatnya tidak optimal, terutama jika pertumbuhan yang tinggi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat. Situasi yang demikian, masih tetap menyisahkan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka program pembangunan ekonomi secara merata sangat dibutuhkan. Program pemerataan pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pemberdayaan harus dilakukan secara seimbang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Infrastruktur dan fasilitas publik lainnya merupakan motor penggerak aktivitas ekonomi.

Selama ini, kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo cenderung terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, akibatnya pergerakan aktivitas ekonomi cenderung bergerak secara tidak seimbang. Kondisi ini pula membuat aktivitas ekonomi berkembang secara tidak merata. Selain itu, Sebaran penduduk juga menjadi tidak merata, karena adanya kecenderungan penduduk terkonsentrasi pada wilayah perkotaan yang lebih berpotensi memberikan kehidupan yang lebih layak. Banyak desa yang mulai ditinggalkan oleh penduduknya, terutama oleh kaum usia muda, banyak memilih untuk merantau karena kampung halaman tidak lagi mampu memberikan peluang kerja yang lebih layak. Pertanian tidak lagi menarik bagi mereka untuk dilakoni. Sedangkan lapangan pekerjaan lain tidak juga sangat terbatas. Karena itu, mereka terpaksa pergi merantau ke daerah atau kota lain.

Tinjauan pustaka

Teori pertumbuhan ekonomi klasik

Pertumbuhan ekonomi pertama kali dibahas oleh Adam Smith dengan judul bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan oleh suatu negara menuju ke arah yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pada konteks ini, Smith berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi (Gregg, 2005). Pada pemikiran ini, Adam Smith berkeyakinan bahwa sistem ini akan menciptakan efisiensi serta dapat pula membawa ekonomi pada kondisi full employment. Selanjutnya, sistem ini akan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*stationary state*). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya dimanfaatkan. Kalaupun ada pengangguran, dianggap bersifat sementara. Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan

perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa. Peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat “aturan main” yang memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar (Todaro, 1994).

Teori pertumbuhan neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Robert M. Solow dari Amerika Serikat dan T.W. Swan dari Australia. Pada Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan yang mendasar dengan model Harrod-Domar ialah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi pada model tersebut (Brock & Taylor, 2010). Disamping itu, model Solow-Swan juga menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Oleh karenanya, syarat-syarat untuk mewujudkan pertumbuhan yang progresif dalam model Solow-Swan kurang restriktif, karena disebabkan oleh terjadinya substitusi antara modal dan tenaga kerja. Dengan demikian, mengakibatkan terjadinya fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja (Elhorst et al., 2010). Teori Solow-Swan melihat bahwa banyak hal dalam mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak ikut campur dalam pasar. Campur tangan pemerintah diperbolehkan melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Ibrahim, 2012). Pandangan para ahli yang sejalan dengan teori tersebut disebut teori Neoklasik. Pendukung teori ini berpandangan bahwa, pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi dapat terlihat dari peningkatan skill sehingga produktivitas perkapita meningkat. Dalam model ini, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu

Teori pertumbuhan ekonomi regional

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, diukur dari seluruh kenaikan nilai tambah yang terjadi. Perhitungan Pendapatan Wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan pendapatan dari satu periode waktu keperiode waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Campbell, 1908).

Teori pertumbuhan ekonomi, dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model Pertumbuhan neo-klasik dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah. Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah bersangkutan (Dhani Kurniawan, 2014). Prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, akan terlihat jelas peranan dari masing-masing sektor potensial yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, seperti yang terlihat pada perkembangan PDRB dan sektor-sektornya.

Ketimpangan pendapatan

Menurut Todaro, pemerataan pembangunan ekonomi yang lebih adil pada negara-negara berkembang akan menciptakan suatu kondisi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Apabila kebijakan pembangunan cenderung dilakukan secara tidak seimbang pada suatu wilayah, maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1994). Ketimpangan pendapatan antar daerah sangat ditentukan oleh besarnya kecilnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan pada suatu wilayah. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan pendistribusian pendapatan. Besar kecilnya perbedaan pendapatan yang diterima sangat menentukan tingkat pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan, biasanya lebih besar terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, sedangkan bagi negara maju, selain memiliki tingkat pendapatan yang tinggi juga diikuti oleh tingkat pemerataan yang rendah (Huda et al., 2007).

Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan biasanya diakibatkan oleh perbedaan

faktor yang dimiliki oleh setiap wilayah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu, antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah, dan lain sebagainya (Benedictus Riandoko, et. al., 2013). Menurut Kuncoro, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur development gap antar wilayah, yaitu: pertama, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto); kedua, HDI (Human Development Index); ketiga, Konsumsi rumah tangga per kapita; keempat, Kontribusi sektoral terhadap PDRB; kelima, Tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Berkaitan dengan itu, faktor paling dominan berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah (Kadiman, 2005)

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia (SDM). Sedangkan daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum memadai akan semakin tertinggal sehingga dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar dan berdampak pula terhadap tingkat pendapatan daerah.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah awalnya dikemukakan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Pada teori tersebut diasumsikan terdapat hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional pada suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Chalid, 2015).

Beberapa teori pembangunan dan pertumbuhan telah membuktikan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah dan ketidakseimbangan melekat dalam setiap tahap pembangunan. Literatur mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut dengan hipotesis Kuznets. Kuznets mengkaji dan mengalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan yang dikenal dengan hipotesis kurva U terbalik. Berdasarkan hipotesis ini ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah cenderung meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonominya, namun pada tahap menengah cenderung tidak berubah dan selanjutnya akan cenderung menurun apabila wilayah tersebut sedang menuju pada ketinggian kesejahteraan (Nikensari et al., 2019).

METODE

Penelitian merupakan desain penelitian kuantitatif. Peneliti akan menganalisis data pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, data jumlah penduduk, dan data lain yang relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data Sekunder yang telah dipublikasi melalui website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo periode tahun 2017.

Menurut Kuncoro (2004), menyebutkan bahwa Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Rapid Growth), daerah maju tapi tertekan (Retarded Region), daerah berkembang cepat (Growing Region), dan daerah relatif tertinggal (Relatively Region). Berikut ini adalah matriks tipologi kelas yang digunakan untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan ekonomi pada setiap wilayah (Elysanti et al., 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tipologi kelas

Sebelum menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, maka pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan analisis tipologi Klassen dalam rangka untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di Provinsi Gorontalo.

Tabel 1. Matriks tipologi kelas kabupaten/kota

No.	Kabupaten/Kota	Rni	Yni	Rdi	Ydi
1	Kab. Boalemo	6,88	19.528.078,58	6,82	24.676.175,20
2	Kab. Gorontalo	6,88	19.528.078,58	7,04	24.127.347,86
3	Kab. Pohuwato	6,88	19.528.078,58	6,89	31.064.122,67
4	Kab. Bone Bolango	6,88	19.528.078,58	7,11	20.459.565,73
5	Kab. Gorontalo Utara	6,88	19.528.078,58	7,29	20.548.823,27
6	Kota Gorontalo	6,88	19.528.078,58	7,58	28.796.832,15

Analisis tipologi kabupaten boalemo

Data Kabupaten Boalemo menunjukkan nilai $Y_{di} = 24.676.175,20$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 6,82$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} < R_{ni}$). Artinya Kabupaten Boalemo masuk dalam kategori daerah maju tapi tertekan (*High Income but Low Growth*) karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Gorontalo.

Analisis tipologi kabupaten gorontalo

Data Kabupaten Gorontalo menunjukkan nilai $Y_{di} = 24.127.347,86$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 7,04$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$). Artinya Kabupaten Gorontalo masuk dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh (*High Growth and High Income*) cepat karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita Kabupaten Gorontalo lebih besar dari pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi Gorontalo.

Analisis tipologi kabupaten pohuwato

Data Kabupaten Pohuwato menunjukkan nilai $Y_{di} = 31.064.122,67$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 6,89$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$). Artinya Kabupaten Pohuwato masuk dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat (*High Growth and High Income*) karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita Kabupaten Pohuwato lebih besar dari pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi Gorontalo.

Analisis kabupaten bone bolango

Data Kabupaten Bone Bolango menunjukkan nilai $Y_{di} = 20.459.565,73$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 7,11$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$). Artinya Kabupaten Bone Bolango masuk dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat (*High Growth and High Income*) karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita Kabupaten Bone Bolango lebih besar dari pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi Gorontalo.

Analisis kabupaten gorontalo utara

Data Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan nilai $Y_{di} = 20.548.823,27$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan nilai $R_{di} = 7,29$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$). Artinya Kabupaten Gorontalo Utara masuk dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat (*High Growth and High Income*) karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita Kabupaten Gorontalo Utara lebih besar dari pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi Gorontalo.

Analisis kota gorontalo

Data Kota Gorontalo menunjukkan nilai $Y_{di} = 28.796.832,15$ dan $Y_{ni} = 19.528.078,58$ ($Y_{di} > Y_{ni}$), sedangkan $R_{di} = 7,58$ dan $R_{ni} = 6,88$ ($R_{di} > R_{ni}$). Artinya Kota Gorontalo masuk dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat (*High Growth and High Income*) karena pertumbuhan dan pendapatan perkapita Kota Gorontalo lebih besar dari pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi Gorontalo.

Indeks willamson

Untuk menganalisis seberapa besar tingkat kesenjangan atau disparitas ekonomi antar wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Menurut Sjafrizal (2012), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat (Mudrajad Kuncoro, 2004). Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan

jumlah penduduk per daerah. PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo (dalam miliar rupiah) tahun 2017. Langkah-langkah perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks indeks williamson tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Yi	Yi-Y	(Yi-Y) ²	fi/n	(Yi-Y) ² (fi/n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab.Boalemo	29.025.643	-547.937	300.234.955.969	0,135	40.531.719.055,815
Kab. Gorontalo	29.045.612	-527.968	278.750.209.024	0,320	89.200.066.887,68
Kab.Pohuwato	36.223.018	6.649.438	44.215.025.715.844	0,131	5.792.168.368.775,5
Kab.Bone Bolango	24.607.150	4.966.430	24.665.426.944.900	0,134	3.305.167.210.616,6
Kab. Gorontalo Utara	24.894.743	4.678.837	21.891.515.672.569	0,096	2.101.585.504.566,6
Kota Gorontalo	33.694.551	4.120.971	16.982.401.982.84	0,180	3.056.832.356.911,3
				Total	14.385.485.226.813

$$IW = \frac{\sqrt{14.385.485.226.813}}{29.573.580} = \frac{3.792.820,22}{29.573.580} = 0,12$$

Berdasarkan hasil penelitian analisis Indeks Williamson, diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 0,12. Hal ini masih tergolong rendah karena tingkat ketimpangan tidak mencapai 0,5. Rendahnya nilai ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo, maka mengindikasikan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo cukup baik. Rendahnya nilai indeks williamson mengindikasikan bahwa program pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya berada pada tingkat pemerataan yang optimal, karena jika dilihat dari nilai indeks Williamson, masih menunjukkan ketimpangan sebesar 0,12 atau sebesar 12 persen. Dengan demikian, kondisi ini masih menyisahkan tanggung jawab kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat terus menekan angka ketimpangan tersebut demi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang telah dituangkan ke dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita tersebut, dapat terwujud apabila pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Location quotient

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk sektor basis dan manakah yang termasuk sektor non basis. Dengan menggunakan data nilai tambah sektor dan PDRB dimasing-masing wilayah maka akan diketahui manakah yang merupakan sektor basis dan sektor non basis. Hal tersebut dapat terlihat jika LQ menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Kemudian jika hasil LQ kurang dari 1 ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor non basis. jika $LQ = 1$, berarti sektor tersebut di wilayah studi dan juga di wilayah referensi memiliki peningkatan (Putra M.F., 2011).

Tabel 3. Analisis sektor basis kabupaten/kota di provinsi gorontalo tahun 2017

Lapangan Usaha	Nilai LQ					
	Kab. Boalemo	Kab. Gorontalo	Kab. Puhuwato	Kab. Bone Bolango	Kab. Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,452	1,057	1,565	0,955	1,307	0,132
Pertambangan dan Penggalian	0,327	1,531	0,794	1,247	1,674	0,249
Industri Pengolahan	0,462	1,04	0,875	1,239	0,457	1,125
Pengadaan Listrik dan Gas	0,380	1,562	0,911	0,592	0,668	1,095
Pengadaan Air,	0,38	0,434	0,525	0,562	0,226	3,109

Lapangan Usaha	Nilai LQ					
	Kab. Boalemo	Kab. Gorontalo	Kab. Puhuwato	Kab. Bone Bolango	Kab. Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
Konstruksi	0,643	1,286	0,561	0,920	0,878	1,164
Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan dan Sepeda Motor	1,076	0,770	0,920	1,159	0,816	1,359
Transportasi dan Pergudangan	0,402	1,313	0,549	0,187	0,655	1,648
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,564	0,879	0,509	0,490	0,787	2,242
Informasi dan Komunikasi	0,513	1,055	0,496	0,69	0,613	1,883
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,495	1,046	0,507	0,522	0,167	2,153
Real Estate	0,680	0,531	0,456	1,383	0,733	6,159
Jasa Perusahaan	0,591	0,739	0,988	1,350	0,574	1,718
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,955	0,591	0,662	1,420	0,982	1,628
Jasa Pendidikan	0,817	0,775	0,537	1,124	0,747	1,823
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,993	0,802	0,683	1,424	0,999	1,300
Jasa Lainnya	0,873	0,813	0,685	1,232	1,129	1,216

Berdasarkan hasil analisis LQ pada lampiran 1 tabel di atas, ditemukan bahwa Kabupaten Boalemo memiliki 2 sektor basis yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan dan Sepeda Motor. Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan adalah sektor yang memiliki rata-rata nilai LQ terbesar yaitu 1,452; Kabupaten Gorontalo memiliki 8 sektor basis yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Penagadaan Listrik dan Gas, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas adalah sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ terbesar yaitu 1,562; Kabupaten Puhuwato memiliki 1 sektor basis yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata nilai LQ sebesar 1,565 dan merupakan nilai LQ terbesar diantara kabupaten lain yang memiliki sektor ini sebagai sektor basis. Berikut, Kabupaten Bone Bolango memiliki 8 sektor basis yaitu Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial adalah sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ terbesar yaitu 1,424. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki 3 sektor basis yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor Jasa Lainnya. Sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ terbesar yaitu 1,674 dan merupakan nilai LQ terbesar dibanding dengan Kabupaten gorontalo dan Bone Bolango yang juga memiliki sektor ini sebagai sektor basis diwilayahnya; dan Kota Gorontalo memiliki 15 sektor basis yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor

Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya. Sektor Real Estate adalah sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ terbesar yaitu 6,159. Jumlah Real Estate yang ada di Kota Gorontalo adalah yang paling terbanyak dibanding dengan wilayah lain di Provinsi Gorontalo yaitu sejumlah 106.

Model rasio pertumbuhan (mrp)

Model MRP digunakan untuk menentukan sektor ataupun subsektor unggulan berdasarkan pertumbuhan PDRB. Terdapat dua rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut, yaitu rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) dan rasio wilayah referensi (RPr).

Tabel 4. Model rasio pertumbuhan kabupaten dan kota provinsi gorontalo periode tahun 2017

No.	Kab. Boalemo		Kab. Gorontalo		Kab. Pohuwato		Kab. Bone Bolango		Kab. Gorontalo Utara		Kota Gorontalo	
	RPs	RPr	RPs	RPr	RPs	RPr	RPs	RPr	RPs	RPr	RPs	RPr
1	0,851	3,166	1,018	3,166	1,081	3,166	1,138	3,166	1,282	3,166	0,665	3,166
2	1,417	200,778	1,511	200,778	-0,657	200,778	-0,436	200,778	1,751	200,778	1,181	200,778
3	0,837	28,506	0,969	28,506	0,985	28,506	1,119	28,506	0,774	28,506	1,137	28,506
4	1,445	1112,917	0,969	1112,917	1,303	1112,917	0,748	1112,917	1,384	1112,917	0,796	1112,917
5	0,725	1642,877	1,125	1642,877	1,172	1642,877	1,412	1642,877	0,919	1642,877	1,040	1642,877
6	1,111	7,401	1,094	7,401	0,900	7,401	1,555	7,401	1,104	7,401	1,071	7,401
7	1,416	8,130	0,865	8,130	1,351	8,130	1,196	8,130	0,951	8,130	1,022	8,130
8	1,034	13,898	1,073	13,898	1,341	13,898	0,945	13,898	0,825	13,898	0,907	13,898
9	1,051	38,6776	0,909	38,6776	0,876	38,6776	1,224	38,6776	0,928	38,6776	1,305	38,6776
10	1,121	24,0616	0,897	24,0616	0,968	24,0616	0,812	24,0616	0,997	24,0616	1,046	24,0616
11	1,123	16,014	1,046	16,014	1,061	16,014	1,164	16,014	1,000	16,014	0,916	16,014
12	1,218	42,658	1,015	42,658	1,016	42,658	0,668	42,658	0,941	42,658	1,431	42,658
13	0,934	1176,151	0,880	1176,151	0,868	1176,151	1,350	1176,151	1,446	1176,151	1,427	1176,151
14	1,494	21,417	1,134	21,417	0,854	21,417	0,867	21,417	1,559	21,417	0,997	21,417
15	1,345	20,012	1,058	20,012	0,884	20,012	0,886	20,012	1,299	20,012	1,119	20,012
16	1,33978	20,248	1,059	20,248	0,890	20,248	0,833	20,248	1,248	20,248	0,773	20,248
17	1,249818	81,066	1,003	81,066	1,151	81,066	0,989	81,066	1,075	81,066	1,464	81,066

Merujuk pada data tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Boalemo memiliki sektor terbanyak yang memiliki nilai positif yaitu sejumlah 13 sektor, kemudian diikuti Kabupaten gorontalo dan Kota Gorontalo sejumlah 11 sektor, lalu kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 10 sektor dan terakhir Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango masing-masing 8 sektor.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor dominan yang memiliki nilai positif di 4 wilayah dari total 6 wilayah yang dianalisis di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango. Sedangkan Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo tidak diperkuat oleh sektor tersebut, karena di kabupaten Boalemo masih didominasi oleh lahan bukan sawah, sedangkan lahan untuk sawah hanya ada di 4 kecamatan dan total 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo yaitu Kecamatan Manangu, Botumoitto, Paguyaman dan Wonosari, dan di Kota Gorontalo luas area persawahan kian berkurang karena alih fungsi lahan pertanian. Namun demikian, Ketimpangan ekonomi tidak sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaanakan tetapi juga dipengaruhi oleh factor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan jumlah industri.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pada penelitian ini ditemukan bahwa Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo memiliki tingkat pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi, Kabupaten Gorontalo memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi dan pertumbuhan tinggi, Kabupaten Boalemo berpendapatan tinggi dan pertumbuhan relatif rendah;

Pada penelitian ini ditemukan bahwa Ketimpangan ekonomi antara wilayah kabupaten/kota di provinsi gorontalo tergolong cukup rendah dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,12 (mendekati 0). Artinya

pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi Gorontalo sudah hampir merata pada setiap kabupaten dan kota; dan

Pada analisis model rasio pertumbuhan, ditemukan bahwa Kabupaten Boalemo terdapat 13 sektor unggulan, diikuti Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sebanyak 11 sektor unggulan, kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 10 sektor unggulan, dan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango masing-masing 8 sektor unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34.
- Brock, W. A., & Taylor, M. S. (2010). The Green Solow model. *Journal of Economic Growth*. <https://doi.org/10.1007/s10887-010-9051-0>
- Campbell, R. A. (1908). Capital Stock. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.2307/1944481>
- Chalid, P. (2015). Teori Pertumbuhan. *Teori Dan Isu Pembangunan*.
- Díez-Minguela, A., González-Val, R., Martínez-Galarraga, J., Sanchis, M. T., & Tirado, D. A. (2020). The long-term relationship between economic development and regional inequality: South-West Europe, 1860–2010. *Papers in Regional Science*. <https://doi.org/10.1111/pirs.12489>
- Elhorst, P., Piras, G., & Arbia, G. (2010). Growth and convergence in a multiregional model with space-time dynamics. *Geographical Analysis*. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2010.00796.x>
- Elysanti, S., P, T. H., & D, H. C. (2015). Analisis Tipologi dan Sektor Potensial Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*, 1–9. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68296>
- Gregg, S. H. (2005). Adam Smith, from An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). In *Empire and Identity*. https://doi.org/10.1007/978-1-137-03961-3_27
- Huda, N., Marwa, T., & Soleh, M. (2007). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer Di Propinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economics & Development Policy*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.29259/jep.v5i1.4833>
- Ibrahim, Z. (2012). Kebijakan Ekonomi Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. *Islamiconomic*.
- Iswanto, D. (2015). *Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015*. 4(1), 41–66.
- Kadiman, I. (2005). Teori dan indikator pembangunan. In *Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Khrismaningrum, N. M. P. (2020). ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI DAN POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH WISATA LAUT DAN DAERAH WISATA GUNUNG DI PROVINSI BALI. *Journal of Economics Development Issues*. <https://doi.org/10.33005/jedi.v3i01.38>
- Kota, K., Jawa, D. I., Tahun, T., Riandoko, B., Kurniawan, A., & Sugiyanto, F. X. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri Dan Pertanian Serta Tingkat Jumlah Orang Yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar*. 2, 1–14.
- Manajerial, M. K. (2014). *MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol. 29 No. 1 Januari 2014*. 29(1), 59–67.

- Model, A., Ir, W. B., & Yusuf, M. (1999). “Model Rasio Pertumbuhan (OMRP)” sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota (Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung). *Economics and Finance in Indonesia*, 47, 219–234.
- Nikensari, S. I., Destilawati, S., & Nurjanah, S. (2019). STUDI ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE DI ASIA: SEBELUM DAN SETELAH MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.11-25>
- Todaro, M. P. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi keempat Jilid I. In *Economic Development*. <https://doi.org/2003>.
- Umiyati, E. (2013). ANALISA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PULAU SUMATERA . *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Ye, X., Ma, L., Ye, K., Chen, J., & Xie, Q. (2017). Analysis of regional inequality from sectoral structure, spatial policy and economic development: A case study of Chongqing, China. *Sustainability (Switzerland)*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/su9040633>.